

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang sedang dihadapi, menuntut kemampuan kompetitif dalam berbagai aspek, termasuk dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Sehubungan dengan itu, upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pasar kerja baik untuk skala regional, nasional maupun internasional. Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan sebagai prana utama peningkatan SDM berkualitas menjadi sangat penting, terutama berkaitan dengan dua hal (teori dan praktik) harus berjalan seiring dan saling melengkapi.

Dalam era globalisasi persaingan antar negara di dunia melalui industrialisasi dan teknologi informasi menjadi semakin ketat dan tajam yang sudah barang tentu akan berdampak terhadap perubahan yang sangat cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini, di satu sisi membuka peluang untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain membawa tantangan terhadap persaingan yang makin ketat dan tajam, sehingga tersedianya SDM yang berkualitas menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Meskipun demikian, upaya yang mengarah kepada peningkatan kualitas SDM, di negara kita sampai dengan akhir abad ke-20 pun belum benar-benar optimal. Hal ini terbukti dengan pembangunan SDM di hampir seluruh wilayah Indonesia, masih belum mengarah kepada kondisi yang diharapkan, karena:

- (1) Struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja yang tidak berpendidikan, sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi,
- (2) Penyiapan tenaga kerja tingkat menengah terkesan hanya dilakukan oleh SMK, sementara sebagian besar tamatan SMU dan yang sederajat banyak tidak melanjutkan pendidikan dan masuk pasar kerja,
- (3) Tingkat pengangguran tamatan sekolah menengah menunjukkan angka 12% untuk tamatan SMK, ditambah lagi dengan tingkat pengangguran tamatan SMU sebanyak 18% (SUPAS, 1995),
- (4) Penguasaan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Semua ini menyebabkan tenaga kerja Indonesia diisi oleh pekerja asing.

Untuk mengantisipasi tuntutan dan permasalahan tersebut di atas, maka upaya-upaya pengembangan berbasis wilayah harus selalu merupakan padanan dari upaya peningkatan kualitas SDM yang terdidik, yang mampu mengikuti corak dan dinamika yang berkembang secara cepat, ekstensif dan mendunia. Dengan demikian, diperlukan kemampuan yang keras untuk mengubah pola pikir dalam mengembangkan sistem pendidikan kejuruan agar dapat mengejar ketinggalan dalam penyiapan SDM yang berkualitas. Kebijakan yang dituangkan dalam buku "Keterampilan Menjelang 2020" merupakan salah satu pemikiran besar yang telah dihasilkan oleh Satgas Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia yang mewakili berbagai disiplin ilmu dan organisasi/instansi penting di negeri ini. Kebijakan tersebut perlu diformulasikan lebih lanjut kedalam bentuk

perencanaan strategis, sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai tahap kegiatan yang sistematis, terprogram dan berkesinambungan. Hal ini dalam upaya mengantisipasi fenomena yang terjadi pada era global yang menunjukkan bahwa persaingan diwarnai oleh penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berorientasi pada perkembangan industrialisasi. Persaingan pada era global tersebut, menuntut penyiapan SDM yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Kondisi ini harus ditopang oleh kesiapan sumber daya yang ada agar dapat bersaing. Sehubungan dengan hal tersebut, dunia pendidikan harus tanggap dan cepat mengantisipasi, sehingga mampu menghasilkan tamatan yang kompeten sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Penyiapan SDM terampil dan profesional berorientasi pada kebutuhan pembangunan, sejalan dengan proses industrialisasi harus memperhatikan tuntutan pasar kerja dan kemampuan kewirausahaan, sehingga tamatan mampu menciptakan lapangan kerja. Kedua tuntutan tersebut semakin kuat dengan munculnya kebijakan makro pemerintah untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut pada hakikatnya adalah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pengembangan diri sendiri.

Media yang dipandang strategis dalam menyiapkan SDM yang terampil dan profesional, maupun meningkatkan kualitasnya adalah pendidikan. Dengan anggapan tersebut, maka pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendidikan guna mendapatkan SDM yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan di lapangan. Jenis pendidikan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik

untuk dapat bekerja dalam bidang keahlian tertentu (UUSPN Nomor 20 tahun 2003, penjelasan pasal 15). Tentang pendidikan kejuruan ini, Sukamto (1988:33) mengemukakan bahwa: "pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang memfokuskan usahanya pada penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)." Meskipun demikian, bukan berarti bahwa pendidikan kejuruan tidak seharusnya mendidik peserta didik dengan seperangkat skill atau kemampuan yang spesifik untuk pekerjaan tertentu saja, karena hal ini biasanya kurang memperhatikan perkembangan peserta didik sebagai suatu totalitas. Dengan demikian, apabila pendidikan kejuruan hanya menekankan pada pengembangan kemampuan spesifik yang terpisah dari totalitas pribadi peserta didik, memiliki makna bahwa pendidikan itu hanya memberi bekal yang sangat terbatas bagi masa depannya sebagai tenaga kerja. Ungkapan ini dipertegas oleh Sukamto (1988 : 26) yang menjelaskan bahwa: "pendidikan kejuruan merupakan upaya dalam menyediakan stimulus yang berupa pengalaman belajar dan interaksi dengan dunia di luar peserta didik untuk membantu mereka mengembangkan diri dan potensinya."

Mengacu pada pernyataan Sukamto di atas, tersirat pesan bahwa proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran dalam pendidikan kejuruan harus memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini terkait juga dengan apa yang ditegaskan dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003, tentang pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang keahlian tertentu. Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa proses pembelajarannya harus dapat membekali peserta didik dengan sejumlah

kemampuan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang terjadi tidak hanya membekali peserta didik dengan kemampuan nalar (teori), tetapi dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (praktik). Mengacu pada uraian di atas, jelaslah bahwa tugas dan tanggung jawab guru di sekolah kejuruan dengan sekolah bukan kejuruan (umum) menjadi berbeda. Untuk sekolah kejuruan, guru dituntut untuk memiliki kemampuan atau kompetensi baik dalam bidang keguruan maupun dalam bidang kejuruan yang dapat membekali peserta didik untuk dapat bekerja dibidangnya. Hal ini berimbas terhadap keberadaan lembaga pendidikan yang menghasilkan guru dalam bidang teknologi dan kejuruan seperti Jurusan Pendidikan Teknik Mesin (JPTM) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

JPTM FPTK UPI, merupakan salah satu sub sistem dari sistem pendidikan nasional, khususnya bagian dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Sebagai bagian dari LPTK, JPTM FPTK UPI diantaranya bertujuan untuk: "menghasilkan sarjana kependidikan yang berkemampuan IPTEK, memiliki semangat dan watak mendidik, serta menjunjung etika kependidikan secara demokratis dalam pembangunan nasional" (Pedoman Kerja JPTM FPTK UPI, 2001:8).

Mengingat JPTM merupakan salah satu bagian dari LPTK dalam bidang Teknologi dan kejuruan, sudah barang tentu bahwa para lulusannya diharapkan dapat berkiprah dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan, baik tingkat menengah (SMK), maupun perguruan tinggi. Sehubungan dengan itu, sudah merupakan keharusan bagi JPTM untuk membekali para lulusannya dengan

berbagai kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan (lembaga pendidikan). Dengan kata lain, para lulusan tersebut harus memiliki kemampuan dalam bidang keguruan dan bidang kejuruan sekaligus. Sudah barang tentu, tuntutan ini akan berimbas kepada proses pembelajaran yang berlangsung.

Melihat hasil pengamatan langsung di lapangan, menunjukkan di beberapa SMK tingkat pencapaian kompetensi masih rendah atau boleh dikatakan masih minim. Sebagai contoh misalnya hasil uji kompetensi di SMKN 6 Bandung pada tahun 2002. Dari 116 siswa peserta, hanya 11 orang atau 7,76 % yang dinyatakan lulus dalam kompetensi bubut, dan 6 orang atau 4,31 % yang dinyatakan lulus dalam kompetensi Frais. Padahal, SMKN 6 Bandung adalah salah satu SMK percontohan pengujian berbasis kompetensi. Kenyataan ini menggambarkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi selama ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pihak yang dipandang paling bertanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran adalah guru. Kaitan dengan fakta di atas, jelaslah bahwa guru belum optimal dalam memainkan perannya sebagai tenaga pengajar atau orang yang bertanggung jawab dalam membekali peserta didik dengan sejumlah kemampuan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Ada berbagai kemungkinan mengapa guru belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu diantaranya adalah kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut, baik dalam bidang keguruan maupun dalam bidang kejuruan.

Gambaran kondisi guru di lapangan tersebut, merupakan bahan kajian dan pemikiran bagi LPTK, khususnya JPTM dalam meningkatkan kualitas

lulusannya sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lulusannya tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang selama ini berlangsung. Proses pembelajaran yang berlangsung di JPTM, saat ini ada yang berlangsung di ruang kelas, laboratorium, maupun di *Workshop*. Proses pembelajaran yang terjadi di ruang kelas, bertujuan membekali para lulusan dengan kemampuan dalam bidang teori. Adapun proses pembelajaran yang terjadi di laboratorium atau *Workshop*, bertujuan untuk membekali para lulusannya dengan kemampuan dalam bidang kejuruan (praktik).

Keberadaan laboratorium dan bengkel (*Workshop*) dalam sebuah lembaga pendidikan kejuruan, merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan dari pendidikan kejuruan adalah untuk menghasilkan tenaga profesi dalam bidang keahlian tertentu yang dapat bekerja langsung di industri, bekerja sendiri sebagai wiraswasta, atau mengembangkan kariernya pada bidang keahlian tertentu setelah menyelesaikan pendidikannya (Sunarto, 1996). Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam suatu lembaga pendidikan kejuruan, harus mempunyai laboratorium dan bengkel yang dilengkapi dengan fasilitas peralatan, perkakas, sumber belajar, dan bahan yang memadai dan relevan dengan jenis kerja yang nantinya akan dilakukan.

Mengenai laboratorium dan bengkel ini, Sunarto (1996) menjelaskan bahwa laboratorium adalah tempat dimana proses belajar mengajar berupa kegiatan praktik yang meliputi: pengukuran dan pengamatan terhadap suatu fenomena fisis, pengujian bahan, dan eksperimen untuk pembuktian atau penerapan suatu teori. Penjelasan ini diperkuat dengan pengertian tentang

laboratorium seperti yang tercantum dalam pasal 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1980, tentang pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri, yang dikutip oleh Sunarto (1996), yaitu: "laboratorium/studio adalah sarana penunjang Jurusan dalam satu atau sebagai ilmu, teknologi, atau seni tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan."

Sejalan dengan itu, dalam buku "The New Grolier Internasional Dictionary of The English Language" sebagaimana dikutip oleh Resna Supratna dkk (1986: 4) dinyatakan bahwa : "Laboratorium adalah suatu bangunan atau ruangan yang direncanakan untuk penelitian keilmuan". Sementara Konsorsium Ilmu Pendidikan, Udin S. Winataputra dkk ((1992: 245) telah merumuskan definisi operasional laboratorium sebagai berikut :

Laboratorium adalah prasarana, sarana dan mekanisme kerja yang menunjang materi pelajaran di dalam kelas melalui pengalaman langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman dan wawasan dalam pengajaran, serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi, kemudian faktor-faktor dan aspek-aspeknya pada dasarnya dapat dikendalikan oleh pengajar.

Adapun pengertian tentang *Workshop/bengkel*, Soetarjo (1996:4) mendefinisikan bahwa :

*Workshop/bengkel* dapat diartikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar keterampilan. Sehubungan dengan pengertian ini, bengkel bukan hanya berarti bengkel tempat praktik peserta didik, tetapi juga berarti tempat para instruktur mengajarkan keterampilan kepada peserta didik agar mereka mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan itu, dalam Webster's New World Dictionary (1980) yang dikutip oleh Sunarto (1996) dijelaskan bahwa Bengkel (*Workshop*) adalah tempat dilaksanakannya aktivitas proses belajar mengajar yang berkaitan dengan pembuatan dan perbaikan perkakas (*equipment*) dan alat. Dari kedua penjelasan

tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bengkel (*Workshop*) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sejumlah kemampuan dalam bidang kejuruan sesuai dengan bidang dan program keahliannya. Dengan demikian, praktik bengkel berorientasi pada kegiatan pelayanan seperti diagnosis kerusakan, membuat, bongkar pasang, dan perbaikan perkakas dan alat.

Berdasarkan masing-masing konsep di atas, dapat dinyatakan bahwa secara umum *Workshop* dan laboratorium berbeda. Namun dalam konteks persekolahan secara fungsional *Workshop* tidak banyak berbeda dengan laboratorium, yaitu tempat berlangsungnya interaksi dalam kegiatan pendidikan, percobaan dan praktik sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang dapat membedakan *Workshop* dengan laboratorium adalah dari segi alat dan bahan praktik yang digunakan. Jenis alat dan bahan yang digunakan tergantung kepada kekhususan materi dan tujuan pembelajaran yang berlangsung dalam *Workshop* maupun laboratorium yang bersangkutan, misalnya peralatan dan bahan dalam *Workshop* berbeda dengan peralatan dan bahan yang digunakan dalam laboratorium IPA, karena bidang garapan materi dan tujuan pembelajaran keduanya berbeda.

Gambaran tentang proses pembelajaran yang berlangsung di *Workshop* JPTM FPTK UPI, berdasarkan hasil pengamatan ternyata masih jauh dari yang di harapkan atau masih belum optimal. Hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan praktek kejuruan yang berlangsung, baik yang bersifat dasar kejuruan seperti Teknologi Mekanik, maupun yang bersifat pendalaman sesuai dengan bidang keahlian, khususnya dalam KBK Teknik Mesin Produksi dan Teknik Mesin

Konstruksi. Dengan banyaknya kegiatan praktek tersebut, sudah barang tentu memerlukan pengelolaan yang tidak mudah, tetapi pengelolaan yang saat ini dilakukan terkesan seadanya, seperti yang terjadi pada proses pembelajaran Teknologi Mekanik. Hal ini diantaranya ditunjukkan dengan ratio antara jumlah alat yang ada dengan jumlah mahasiswa yang melaksanakan praktik masih jauh dari ideal, ratio antara dosen dengan mahasiswa juga masih belum begitu baik. Keadaan yang demikian itu, sudah barang tentu berdampak terhadap tingkat penguasaan mahasiswa pada kompetensi yang diharapkan.

Bertolak dari uraian di atas, perlu kiranya dilakukan penataan secara optimal terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan di LPTK, seperti JPTM FPTK-UPI. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini akan difokuskan pada ***manajemen pembelajaran di workshop Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK-UPI***, dalam upaya memenuhi standar kompetensi minimal seorang guru sekolah kejuruan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## **B. Fokus Penelitian dan Pembatasan Masalah**

Berkaitan dengan masalah proses pendidikan (proses pembelajaran) di lembaga pendidikan formal khususnya, ada beberapa komponen yang saling terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Komponen-komponen tersebut ada yang tergolong ke dalam *Instrumental input* (SDM/guru, Fasilitas, dan kurikulum); *raw input* (peserta didik dengan segala karakteristiknya); *environmental input* (Lembaga pemerintah dan swasta, industri, dan masyarakat); dan hasil/tamatan. Meskipun dalam pendidikan kejuruan, komponen-komponen tersebut ada, tetapi dalam proses pembelajarannya berbeda

dengan pendidikan non kejuruan (pendidikan umum). Hal ini dikarenakan pendidikan kejuruan diarahkan untuk membekali peserta didiknya dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dipilihnya.

Mengingat pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan non kejuruan (pendidikan umum), sudah barang tentu proses pembelajarannya pun berbeda. Hal ini dapat difahami, karena seperti dijelaskan dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 penjelasan pasal 15, bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang keahlian tertentu. Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa proses pembelajarannya harus dapat membekali peserta didik dengan sejumlah kemampuan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Dengan kata lain, dalam pendidikan kejuruan, proses pembelajaran yang mengarah pada penguasaan keterampilan merupakan hal yang sangat urgen. Proses pembelajaran tersebut, untuk selanjutnya dalam penelitian ini diistilahkan dengan proses pembelajaran praktik.

Proses pembelajaran praktik yang terjadi di *Workshop* JPTM FPTK UPI, pada saat ini cukup banyak, baik yang bersifat dasar kejuruan, maupun yang bersifat pendalaman sesuai dengan bidang keahlian, khususnya dalam KBK Teknik Mesin Produksi dan Teknik Mesin Konstruksi. Adanya keanekaragaman jenis praktik kejuruan yang dilaksanakan di *Workshop*, sudah barang tentu menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengelolaan secara optimal. Dengan banyaknya proses pembelajaran praktik yang berlangsung di *Workshop* tersebut, maka dalam penelitian ini difokuskan pada **pengelolaan pembelajaran praktik**

**Teknologi Mekanik**, dengan kajian penelitian berangkat dari aspek manajemen pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Atas dasar uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana pengelolaan pembelajaran praktik Teknologi Mekanik di *Workshop* JPTM FPTK UPI dalam rangka memenuhi standar kompetensi minimal seorang guru sekolah kejuruan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)?**

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti, maka permasalahan pokok tersebut dirinci lagi ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pengelolaan pembelajaran praktik Teknologi Mekanik di *Workshop* Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI yang berlangsung saat ini dalam upaya pencapaian sasaran kurikulum?

Lebih lanjut, pertanyaan tersebut dirinci kembali sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyusunan program pembelajaran praktik Teknologi Mekanik?
- b. Bagaimana perencanaan materi praktik Teknologi Mekanik yang mendukung pemenuhan standar kompetensi minimal seorang guru SMK?
- c. Bagaimana perencanaan fasilitas, alat, bahan, dan biaya operasional dalam pembelajaran Teknologi Mekanik?

- d. Bagaimana penyusunan atau penyiapan dokumen pendukung kegiatan pembelajaran Teknologi Mekanik (*SAP, Hand Out, Job Sheet, Lembar Informasi* dan sejenisnya)?
  - e. Bagaimana perencanaan tenaga pelaksana dalam kegiatan praktik Teknologi Mekanik?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan pembelajaran praktik Teknologi Mekanik di *Workshop* Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI yang berlangsung saat ini dalam membekali para mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di SMK?

Pertanyaan ini dirinci kembali sebagai berikut:

- a. Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses pengelolaan pembelajaran praktik Teknologi Mekanik?
  - b. Bagaimana optimalisasi penggunaan fasilitas *Workshop* dalam proses pembelajaran?
  - c. Bagaimana optimalisasi penggunaan bahan dalam proses pembelajaran?
  - d. Bagaimana optimalisasi penggunaan alat dalam proses pembelajaran?
  - e. Bagaimana optimalisasi personal yang terlibat dalam mengelola proses pembelajaran?
  - f. Bagaimana pemeliharaan alat dan bahan dilakukan?
  - g. Bagaimana pencatatan alat dan bahan dilakukan?
  - h. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran?
  - i. Bagaimana hasil belajar peserta didik (mahasiswa) diukur?
3. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan pembelajaran Teknologi Mekanik yang selama ini berlangsung?

Pertanyaan tersebut dirinci kembali sebagai berikut:

- a. Siapa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pembelajaran Teknologi Mekanik?
  - b. Bagaimana teknik pengawasan yang dilakukan?
  - c. Terhadap kegiatan mana pengawasan dilakukan?
4. Bagaimana *output/luaran* pengelolaan pembelajaran praktik Teknologi Mekanik yang selama ini berlangsung di *Workshop* JPTM FPTK UPI?

Pertanyaan tersebut dirinci kembali sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebagai *output/luaran* dari pengelolaan pembelajaran?
- b. Bagaimana hasil belajar peserta didik sebagai *output/luaran* dari pengelolaan pembelajaran?

#### **D. Definisi Operasional**

Berikut ini penjelasan mengenai istilah dan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **1. Manajemen**

Manajemen jika ditinjau dari asal katanya "to manage", memiliki arti mengatur, menata, atau mengelola. Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen dalam penelitian ini adalah suatu proses pengelolaan, khususnya dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan belajar mengajar praktik pada mata kuliah Teknologi Mekanik dalam mencapai tujuan (tujuan pembelajaran).

## 2. Pemelajaran

Pemelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan belajar mengajar dengan menitikberatkan atau memfokuskan pada aktivitas peserta didik. Dengan demikian, mengajar dalam konteks ini, adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh seorang pengajar agar peserta didik/mahasiswa dapat belajar, bukan pada asumsi pada bagaimana guru mengajar atau menyampaikan materi. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan pemelajaran adalah bagaimana upaya tenaga pengajar dalam membelajarkan peserta didik.

## 3. *Workshop*

*Workshop* (bengkel) dalam Webster's New World Dictionary (1980) yang dikutip oleh Sunarto (1996) adalah tempat dilaksanakannya aktivitas proses belajar mengajar yang berkaitan dengan pembuatan dan perbaikan perkakas (*equipment*) dan alat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bengkel (*Workshop*) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sejumlah kemampuan dalam bidang kejuruan sesuai dengan bidang dan program keahliannya. Sehubungan dengan itu, praktik bengkel beorientasi pada kegiatan pelayanan seperti diagnosis kerusakan, membuat, bongkar pasang, dan perbaikan perkakas dan alat.

## 4. Jurusan Pendidikan Teknik Mesin

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin (JPTM) adalah salah satu jurusan yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di lingkungan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jurusan Pendidikan Teknik

Mesin ini merupakan salah satu bagian dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menghasilkan guru/instruktur dalam bidang Teknologi dan Kejuruan Mesin, dan tenaga pengajar pada LPTK serta lembaga-lembaga pendidikan kejuruan lainnya. Sehubungan dengan itu, JPTM FPK-UPI bertujuan untuk: "menghasilkan sarjana kependidikan yang berkemampuan IPTEK, memiliki semangat dan watak mendidik, serta menjunjung etika kependidikan secara demokratis dalam pembangunan nasional" (Pedoman Kerja JPTM FPK UPI, 2001:8).

#### 5. FPK-UPI

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPK), merupakan salah satu Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dan bertujuan diantaranya adalah mendidik dan menghasilkan tenaga kependidikan Teknologi dan kejuruan (guru, ahli pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya) secara akademis dan profesional, sehingga berkontribusi bagi peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia (Informasi Universitas Pendidikan Indonesia 2003).

### **E. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan serta memprediksi implikasinya dan memberi rekomendasi berdasarkan fenomena yang muncul sesuai dengan fokus permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran praktik kejuruan di *Workshop* Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPK UPI.

## 2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum di atas, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis pengelolaan pembelajaran praktik di *Workshop* Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI yang mencakup:

- a. Aspek perencanaan, meliputi: penyusunan program pembelajaran; perencanaan tenaga pelaksana; perencanaan materi; perencanaan fasilitas, alat dan bahan; dan penyusunan atau penyiapan dokumen pendukung kegiatan pembelajaran.
- b. Aspek pelaksanaan, meliputi: proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pembelajaran praktik; optimalisasi fasilitas, alat, bahan, dan personal; pemeliharaan alat dan bahan; pencatatan alat dan bahan; pengawasan pelaksanaan pembelajaran; dan pengukuran hasil belajar peserta didik.
- c. Aspek pengawasan, meliputi: pelaksana pengawasan, teknik pengawasan, dan kegiatan-kegiatan yang diawasi.
- d. *Output* pengelolaan pembelajaran praktik yang berkaitan dengan aspek kinerja KBM dan Hasil belajar peserta didik (mahasiswa) yang dalam hal ini adalah tingkat penguasaan standar kompetensi minimal seorang guru praktik di SMK.

## F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yang dipandang dari dua aspek, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam:

1. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang Administrasi Pendidikan, khususnya dalam pengelolaan pendidikan kejuruan.
2. Meningkatkan wawasan tentang pola-pola pengelolaan pembelajaran praktik di lembaga pendidikan kejuruan.
3. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan pembelajaran praktik yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bahan pertimbangan bagi JPTM FPTK-UPI dalam mengembangkan manajemen pembelajaran di *workshop*, dalam upaya meningkatkan kualitas lulusannya, sehingga memiliki standar kompetensi minimal yang sesuai dengan kebutuhan calon guru pendidikan menengah kejuruan.
2. Bahan masukan bagi para penyelenggara pendidikan kejuruan dalam mengelola pembelajaran, khususnya pengelolaan pembelajaran di *workshop*.

### **G. Paradigma Penelitian**

Lembaga pendidikan formal (sekolah) termasuk lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan seperti JPTM, menurut Suharsimi (1988:103) merupakan salah satu bentuk dari sebuah sistem sosial. Hal ini dapat difahami, karena JPTM pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang merupakan salah satu bentuk dari sistem sosial. Pengertian tentang sistem sosial sendiri menurut Suharsimi (1988:103) adalah " sekelompok pribadi yang saling berinteraksi dan terikat dengan sebuah hubungan sosial." Mengingat didalamnya

tersurat tentang hubungan sosial, maka keberadaan sistem tersebut tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem sosial adalah suatu bentuk jalinan interaksi antar manusia dalam jumlah banyak yang berada dalam suatu lingkungan sosial.

Lembaga pendidikan kejuruan, memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga pendidikan non kejuruan. Oleh karena, lembaga pendidikan kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk mampu bekerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan keahliannya. Atas dasar itu, maka proses pembelajarannya pun berbeda dengan proses pembelajaran yang terjadi di lembaga pendidikan umum (non kejuruan). Dalam lembaga pendidikan kejuruan, proses pembelajaran itu harus mampu membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan nalar (teori) dan kemampuan praktik (kejuruan). Agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan optimal, maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Khusus dalam pengelolaan pembelajaran praktik, harus diperhatikan beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada yang tergolong ke dalam *Instrumental input* (SDM/guru, Fasilitas/sarana prasarana, dan kurikulum); *raw input* (peserta didik dengan segala karakteristiknya); dan *environmental input* (Lembaga pemerintah dan swasta, industri, dan masyarakat).

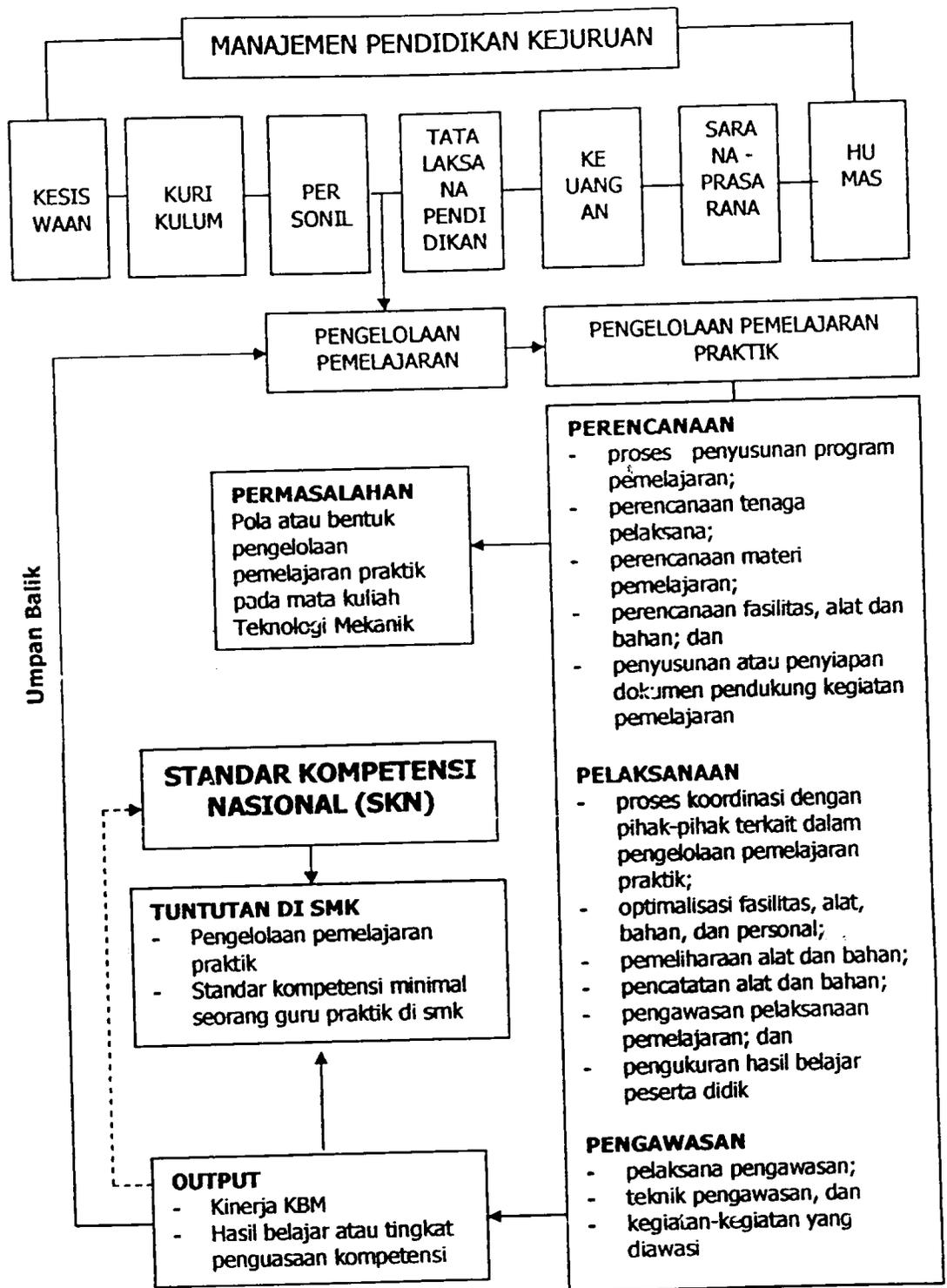
Pengelolaan pembelajaran, merupakan salah satu aspek yang ditelaah dalam ruang lingkup administrasi sekolah. Kajian penelitian ini beranjak dari aspek manajemen pada umumnya yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap **perencanaan** dilihat tentang proses

penyusunan program pembelajaran; perencanaan tenaga pelaksana; perencanaan materi; perencanaan fasilitas, alat dan bahan; dan penyusunan atau penyiapan dokumen pendukung kegiatan pembelajaran. Pada tahap **pelaksanaan**, dilihat tentang proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pembelajaran praktik; optimalisasi fasilitas, alat, bahan, dan personal; pemeliharaan alat dan bahan; pencatatan alat dan bahan; pengawasan pelaksanaan pembelajaran; dan pengukuran hasil belajar peserta didik. Pada tahap **pengawasan** berkenaan dengan pelaksana pengawasan, teknik pengawasan, dan kegiatan-kegiatan yang diawasi.

Ketiga aspek manajemen tersebut, selanjutnya dianalisis untuk melihat apakah pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan telah mencerminkan suatu usaha untuk memenuhi standar kompetensi minimal sebagai calon guru di SMK. Keberhasilan dari pengelolaan tersebut paling tidak akan terlihat dari adanya indikator seperti: tingkat penguasaan kompetensi peserta didik yang merupakan gambaran dari keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran, situasi pembelajaran yang kondusif, dan meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Melalui analisis ini, diharapkan dapat menggambarkan tentang pola pengelolaan pembelajaran praktik yang selaras dengan karakteristik pendidikan kejuruan, khususnya pada pendidikan menengah kejuruan (SMK). Mengingat JPTM FPTK UPI sebagai LPTK yang bertanggung jawab terhadap kualitas calon guru di SMK, maka dalam analisis tersebut akan dikaji juga tentang pola pengelolaan pembelajaran praktik di SMK dan standar kompetensi minimal yang dibutuhkan bagi seorang guru praktik di SMK. Hal ini dilakukan mengingat pada saat ini SMK telah melaksanakan pembelajaran yang berbasis kompetensi dengan mengacu pada standar

kompetensi nasional (SKN). Dengan demikian, harapannya dapat terungkap sejauh mana standar kompetensi minimal bagi seorang guru praktik di SMK telah dikuasai oleh para peserta didik (mahasiswa) calon tenaga guru di SMK.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1: Paradigma Penelitian Manajemen Pembelajaran Praktik



